



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMU TRI WAHYUDIN**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **199107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.005.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 965.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/180 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 296 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 665.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 125.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG LGX PENUMPANG Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FREEGO 125 CC/ BKU A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T / SOLO Tahun 2016, HADIAH Rp. 6.000.000



7. LAINNYA, POLYGON SEPEDA BALAP / RB Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	101.099.674
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.265.349.674
III. HUTANG	Rp.	15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.250.349.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.